

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MANAJEMEN MUTU
PENDIDIKAN
(Studi Kasus di SMK Negeri 2 Metro)**

Oleh

Makmun, Sumadi, Alben Ambarita

FKIP Unila: Jl. Soemantri Brojonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung

E-mail: makmun.smk2@gmail.com

HP: -

Abstract: The Involvement of School Committee in Improving the Education Quality Management. The objectives of these research are to describe and analyze the involvement of the school committee as the giver of consideration, support as the controller and mediator in improving the quality of vocational education in SMKN 2 Metro. The research was conducted through a qualitative approach with a case study design. The data were collected by in-depth interview techniques, observations, and study documentations from some informants as follow: school committee, headmaster, teachers, SMK advisor, and students' parents. The data analysis was analyzed by applying data reductions, data displays, and giving conclusions. The checking of data validity is done in credibility, dependability and confirmability. The research findings show that the establishment of the committee was referring to the provisions of laws and involved elements of teacher councils, communities, government, business communities or industries. The prominent roles of the committee are their giving considerations related to the provision and support, while the committee's role as a controller's is still limited in the use of school budgets and less touching on academic issues and evaluation of school performance. So that the role of mediation needs to be improved since the school requires collaboration with many elements. The school committee is as an independent organization who help the school in giving supports to realize the qualified education in SMK N 2 Metro.

Keywords: education improving, quality management, school committees

Abstrak: Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Manajemen Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMK Negeri 2 Metro). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pemberi dukungan, sebagai pengontrol dan sebagai mediator, dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Metro. Penelitian dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara yang mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan sebagai berikut : Komite sekolah, Kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua siswa SMK Negeri 2 Metro. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data dilakukan dengan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan komite telah mngacu pada ketentuan peraturan perundangan dan melibatkan unsur dewan guru, masyarakat, pemerintah dan kalangan dunia usaha dan industri. Peran

komite sekolah yang menonjol terkait dengan pemberian pertimbangan dan dukungan, sedangkan peran komite sebagai pengontrol masih terbatas dalam penggunaan anggaran sekolah dan kurang menyentuh pada masalah akademik dan evaluasi kinerja sekolah. Begitu juga peran mediasi didukung oleh stakeholder, mengingat SMK memerlukan kerjasama dengan banyak unsur. Komite sekolah sebagai organisasi independen sangat membantu dalam mewujudkan pendidikan di SMK Negeri 2 Metro yang bermutu

Kata kunci: komite sekolah, manajemen mutu, peningkatan pendidikan

Pembinaan pendidikan dasar dan menengah adalah mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat dengan memperkenalkan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite Sekolah di tingkat sekolah.

Konsep desentralisasi dalam pendidikan muncul sejalan dengan perkembangan pola pikir masyarakat sebagai salah satu dampak pembangunan pendidikan. Pemikiran pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah melahirkan konsep gagasan untuk mengembangkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan nasional.

Simon (dalam Komariah dan Triatna, 2004:70) mendefinisikan desentralisasi sebagai suatu organisasi administratif adalah sentralisasi yang luas apabila keputusan yang dibuat pada level organisasi yang tinggi, desentralisasi yang luas apabila keputusan didelegasikan dari top management kepada level yang rendah dari wewenang eksekutif. Berdasarkan pengertian tersebut, desentralisasi merupakan wujud kepercayaan pusat kepada daerah untuk melaksanakan pembangunannya berdasarkan prakarsa sendiri. Implikasinya adalah daerah harus bertanggung jawab secara profesional untuk menampilkan kinerja terbaiknya.

Secara lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 56 menyebutkan bahwa di

masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah yang berperan sebagai berikut: (a) Masyarakat berperan dalam peningkatan perannya yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. (b) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. (c) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Selanjutnya Sagala (2011:234) berpendapat bahwa masyarakat akan menjadi tumpuan atas peningkatan dan pelayanan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, sehingga hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan. Di alinea lain juga disebutkan bahwa masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingnya bagi satuan pendidikan, hal ini dapat kita lihat pada beberapa kasus yang muncul ke permukaan, bahwa satuan pendidikan

yang tutup dan tidak dapat meneruskan program-program pendidikannya karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

Konsep Manajemen Mutu Terpadu (MMT) pada dasarnya adalah menekankan pada kepuasan pelanggan dan pelayanan yang bermutu. Dalam dunia pendidikan, manfaat penerapan MMT adalah perbaikan, pelayanan, pengurangan biaya, dan kepuasan pelanggan. Manajemen Mutu Terpadu (*Total Quality Management*) merupakan suatu sistem nilai yang mendasar dan komprehensif dalam mengelola organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan memberikan perhatian secara khusus pada tercapainya kepuasan pelanggan dengan tetap memperhatikan secara memadai terhadap terpenuhinya kebutuhan seluruh *stakeholders* organisasi yang bersangkutan.

Manajemen Mutu Terpadu menurut West Burnham dalam Usman H (2009:267) ialah semua fungsi dari organisasi sekolah ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep mutu, kerja tim, produktivitas, dan prestasi serta kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut Sallis dalam Usman H (2009:567), MMT ialah menciptakan budaya mutu dimana tujuan setiap anggota ingin menyenangkan pelanggannya. Pelanggan adalah yang berkuasa atau sebagai raja yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dengan mengacu pada standar pelayanan minimal meliputi: kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana, organisasi, pembiayaan, manajemen sekolah, dan peranserta masyarakat. Pemberdayaan Manajemen Komite Sekolah adalah suatu pengaturan atau pemanfaatan potensi yang ada pada badan mandiri

yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Maya H (2012:167) menyatakan dalam penyelenggaraan pendidikan, peran serta masyarakat sangat penting sebagai salah satu elemen pendukung terwujudnya pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa manfaat pendidikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Komite Sekolah juga merupakan wadah bagi orang tua atau masyarakat yang peduli pendidikan untuk membantu memajukan pendidikan di sekolah seperti membantu menyediakan fasilitas pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru. Intinya tugas Komite Sekolah dapat membantu mempercepat atau mengoptimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah.

Sagala (2011:234) menyatakan sekolah dan masyarakat merupakan dua komunitas yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya, bahkan ikut memberikan warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu di sekolah oleh suatu masyarakat tertentu. Sekolah berperan dalam melestarikan dan memindahkan nilai-nilai kultur pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama yang dianut para guru dan peserta didiknya kepada generasi penerus dan untuk menjamin kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan sosial dengan menjadi pelaku aktif dalam perbaikan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

Paradigma lama, hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat

dipandang sebagai institusi yang terpisah-pisah. Pihak keluarga dan masyarakat dipandang tabu untuk ikut campur tangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, apalagi sampai masuk ke wilayah kewenangan profesional para guru. Sedangkan Ki Hajar Dewantara (dalam Maya. H, 2012:145) menyatakan bahwa kesuksesan pendidikan harus ditopang bersama oleh keluarga, sekolah dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan adalah data yang memberikan gambaran dan melukiskan realita sosial yang lebih kompleks sedemikian rupa menjadi gejala sosial yang konkrit. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013:4) mendefinisikan Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Jane Richie (dalam Moleong, 2013:6) Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang diteliti.

Dari beberapa kajian tersebut Moleong (2013:6) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus. Seperti di

tegaskan Stake (1995) dan Creswell (1998), Yin (2003) berpendapat bahwa penelitian studi kasus menggunakan berbagai sumber data untuk mengungkapkan fakta di balik kasus yang diteliti. Keragaman sumber data dimaksudkan untuk mencapai validitas dan reliabilitas data, sehingga hasil penelitian dapat diyakini kebenarannya. Fakta dicapai melalui pengkajian keterhubungan bukti-bukti dari beberapa sumber data sekaligus, yaitu dokumen, rekaman, observasi, wawancara terbuka, wawancara terfokus, wawancara terstruktur, dan survey lapangan. Di samping fakta yang mendukung proposisi, fakta yang bertentangan terhadap proposisi juga diperhatikan, untuk menghasilkan keseimbangan analisis, sehingga objektivitas hasil penelitian terjaga.

Kehadiran peneliti menjadi tolak ukur keberhasilan terhadap beberapa kasus. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Hal ini juga dikemukakan oleh Sugiyono (2010: 222) bahwa instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, akan tetapi ketika fokus penelitian menjadi lebih jelas, maka akan dikembangkan instrumen peneliti sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question, tahap facused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Selanjutnya Nasution (dalam Sugiyono, 2010:223) menyatakan penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang

diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu di kembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. Kehadiran peneliti di lapangan diharapkan dapat bekerja sama dengan subyek penelitian. Peneliti diharapkan mampu berinteraksi dengan subyek secara wajar di lapangan, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Hubungan baik antara peneliti dengan subyek sebelum dan

selama dilapangan merupakan kunci utama keberhasilan dalam pengumpulan data.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah manusia dan bukan manusia (Miles dan Huberman, 1998:2). Sedangkan menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama (informan) adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Daftar Informan Penelitian

No	Informan (Jabatan)	Jumlah	Kode
1	Kepala Sekolah	1	St
2	Ketua Komite Sekolah	1	Sg
3	Anggota komite sekolah	8	Sh,Sb,Sp,Il, Sr,Sy,Gp,Sn
4	Pengawas	1	Wh
5	Guru SMK Negeri 2 Metro	4	A, Tp, Nw, Sr
6	Orang tua siswa	5	K, Yn, Tn, Nw, Mr
7	Masyarakat	3	Ww, J, Ut
8	Siswa	2	Hd, Pp

Sumber: Data Primer Peneliti

Kemudian hasil wawancara yang dirancang khusus dalam kajian ini merupakan data utama (primer) dalam sumber data, selain itu diperlukan juga data skunder yaitu bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, media cetak dan elektronik seperti artikel, jurnal, foto, data statistik dan lain sebagainya.

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian, observasi data yang diperoleh dalam penelitian ini, dilakukan guna mendapatkan informasi tambahan dari hasil wawancara.

Tabel. 3.2 Indikator observasi

No	Sasaran	Indikator	Keterangan	
			Baik	Tidak baik
1	Komite Sekolah	1. Ruangkomite 2. Fasilitas ruang komite	V V	
2	Kepala Sekolah	Ruang kepala sekolah	V	
3	Sarana Prasarana	1. Ruang kelas 2. Lingkungan sekolah 3. Lapangan olah raga 4. Tempat ibadah 5. Ruang guru	V V V V V	
4	Pembelajaran	1. Administrasi ruang kelas 2. Kondisi ruang kelas 3. Kondisi pembelajaran	V V V	

Sumber: Data Primer Peneliti

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan keterangan/informasi dari seorang informan melalui pertanyaan yang diajukan peneliti. Materi dalam penelitian ini adalah tentang peran komite sekolah dalam peningkatan manajemen mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Metro. wawancara, yaitu pertanyaan yang disusun secara tertulis untuk memperoleh data berupa Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang lokasi yang nyata dijadikan sebagai objek penelitian ini, yaitu SMK Negeri 2 Metro, baik

jawaban-jawaban serta wawancara ataupun tanya jawab secara langsung (secara lisan) dari responden . Responden yang akan dimintai keterangan adalah pengurus komite sekolah, kepala sekolah dan guru SMK Negeri 2 Metro. Data yang diperoleh dari wawancara langsung merupakan sumber data utama primer dalam penelitian ini. keberadaan fisik maupun keadaan administrasi sekolah. Kemudian objek penelitian lainnya adalah Komite Sekolah SMK Negeri 2 Metro.

Tabel. 3.4 Dokumen Penelitian

No	Dokumen	Tahun	Tentang
1	Komite Sekolah	2012/2013	AD/ART Komite SMK Negeri 2 Metro
2	Pedoman Mutu	2009	ISO 9001-2008
3	Evaluasi siswa	2011/2012 2012/2013	Nilai Ujian Nasional
4	Data Pokok Sekolah	2012/2013	Guru Sarana Prasarana

Sumber: Data Primer Peneliti

Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari observasi di lapangan, wawancara dan analisa dokumen. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca secara cermat, dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya peneliti mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari proses analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini mulailah kita tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan metode tertentu (Ghony dan Almansur, 2012).

Memproses analisis data dalam model Miles dan Huberman (1998) dapat melalui tiga proses, yaitu :

1) Pengumpulan Data (*data collection*)

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Data yang diperoleh dapat melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan (triangulasi).

2) Proses Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi data dilakukan dengan caramembuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Reduksi data ini

berlangsung secara terus menerus selama kegiatan penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.

3) Proses Penyajian Data

Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut. Penyajian data yang akan digunakan adalah berupa matriks, grafik, jaringan dan bagan.

4) Proses Menarik Kesimpulan

Proses menarik kesimpulan dimulai dari mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Peneliti harus mampu menangani kesimpulan tersebut secara longgar, tetap terbuka dan skeptis. Kesimpulan adalah berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau justru masih gelap sehingga setelah diselidiki menjadi jelas, dapat berupa kausal atau hubungan interaktif, hipotesis atau teori.

Penulisan data dalam teks naratif ditulis secara singkat dan jelas serta komunikatif. Dalam menyajikan penulis akan memaparkan secara rinci, sistematis dan menarik. Seluruh data yang terkumpul oleh peneliti akan dibaca, dipahami dan dianalisis secara intensif.

Pemeriksaan keabsahan data menurut Miles & Huberman (1998) dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Pengecekan kredibilitas (kebenaran) yaitu meningkatkan kemungkinan temuan yang dapat dipercaya akan dihasilkan. Ada tiga cara

yang dapat dilakukan dalam kredibilitas ini yaitu keterlibatan yang diperpanjang, observasi yang terus menerus dan triangulasi. Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data dan tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan waktu perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti tinggal di lokasi penelitian sampai mencapai kejenuhan dalam pengumpulan data tercapai. Kelebihannya adalah membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks, membatasi kekeliruan atau bias peneliti, mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa dan akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

Observasi yang terus menerus berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Ketekunan dalam observasi adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, pengamatan menyediakan kedalaman. Pengamatan dilakukan pada faktor-faktor yang menonjol kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan awal tampak salah satu faktor atau seluruhnya yang ditelaah sudah dipahami dengan cara biasa.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan (a) diskusi dengan teman sejawat, (b) triangulasi data dan metode. Diskusi teman sejawat dimaksudkan untuk membicarakan dan melihat kelemahan serta kekurangan

dari penelitian mendapat masukan guna penyempurnaan. Diskusi teman sejawat dilakukan dengan cara membicarakan data temuan-temuan penelitian kepada teman sejawat. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan kebenaran data atau informasi dari informan lain yang berbeda. Triangulasi metode diarahkan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Misalnya, hasil observasi dibandingkan atau dicek dengan wawancara, kemudian dicek lagi melalui dokumen yang relevan.

Pengecekan dependabilitas (data konstan) diperoleh melalui triangulasi sumber. Dalam obyek dan isu yang sama ditanyakan kepada beberapa sumber yaitu : kepala sekolah, ketua komite, guru, dan orang tua untuk mendapatkan data yang konstan.

Pengecekan konfirmabilitas (kecocokan data) melalui triangulasi metode, yaitu dengan wawancara dengan informan, pengamatan kegiatan komite di satuan pendidikan, dan pengkajian dokumen yang terkait dengan peran komite. Pengkajian dokumen dilakukan terhadap peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 2 Metro. Dokumen yang dikaji meliputi AD/ART komite sekolah, penyusunan RKAS, dan program kerja komite SMK Negeri 2 Metro.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peran Komite SMK Negeri 2 Metro

Membangun pendidikan pada satuan pendidikan (sekolah) dari yang berkualitas tidak semudah membalik telapak tangan. Untuk memperoleh semua itu diperlukan sinergi antara

Komite sekolah (sebagai perwakilan masyarakat) dengan kepala sekolah beserta dewan guru. Tanpa melakukan itu, sekolah tidak dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Satu sisi Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah namun di satu sisi, Komite Sekolah berhak memberikan pertimbangan atas rancangan yang dibuat oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang sama tentang apa saja yang menjadi peran Komite sekolah. Scott et al (dalam Kanfer, 1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu: 1) Peran itu bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individunya. 2) Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. 3) Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*). 4) Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. 5) Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 56 membahas tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan diatur dalam pasal 56 ayat 1 yang menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam pasal yang sama ayat 3 tertulis Komite Sekolah/ madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dengan

demikian Komite Sekolah dalam rangka memberikan peran harus mampu meningkatkan peran dan partisipasi aktif pemangku kepentingan. Dikaitkan dengan hasil pengamatan dan wawancara dengan Komite SMK Negeri 2 Metro diketahui bahwa peran pemberi pertimbangan, peran pendukung, peran pengawasan, dan peran sebagai mediator sebagai peran yang sudah di tentukan. Melalui ke empat peran tersebut, Komite Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 2 Metro apalagi dipercaya sebagai sekolah rujukan, berdasarkan acuan dan indikator kinerja peran Komite sekolah dapat di lihat pada lampiran 3 dan 5

Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Beberapa temuan di lapangan yang terkait yakni :

- 1) Sumber utama pendanaan SMK Negeri 2 Metro sebagai sekolah rujukan berasal dari dana komite dan BOS.
- 2) Peran komite sekolah lebih mendukung program fisik sekolah dan dukungan terhadap non fisik (proses pembelajaran) masih cukup lemah.
- 3) Belum ada papan informasi sekolah yang berisi informasi tentang laporan keuangan sekolah dan rencana kerja tahunan sekolah
- 4) Rata-rata hasil UN di SMK Negeri 2 Metro tahun ajaran 2012/2013 menduduki peringkat 3 di kota Metro.
- 5) Perilaku semua siswa SMK Negeri 2 Metro melepaskan sepatu setiap masuk kelas dalam menjaga kebersihan ruang kelas.

Merujuk pada kondisi obyektif komite sekolah maupun hasil temuan di SMK Negeri 2 Metro dapat dikatakan bahwa urusan pendidikan merupakan hal penting bagi agenda pembangunan

pemerintah Indonesia terutama terhadap penerapan sekolah rujukan bagi sekolah lainnya.

Dukungan dan upaya pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan terus diupayakan melalui pendanaan sekolah yang dilakukan sejak tahun 2005. Pemerintah sudah meluncurkan program yang disebut BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk SMK mulai tahun 2012, sebagai cara untuk menyampaikan dana secara langsung ke sekolah-sekolah agar anak-anak tetap bersekolah dan memberi sekolah kebebasan dalam mengelola dana mereka sendiri. Adanya program beasiswa pertanian merupakan bukti komitmen Pemerintah terhadap kewajiban konstitusional untuk menyediakan pendidikan berkualitas untuk di SMK. Program BOS menyediakan pendanaan bagi sekolah-sekolah untuk pengeluaran operasional diluar gaji, bertujuan untuk meringankan beban biaya masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu, sekaligus mendukung belanja peningkatan kualitas sekolah baik negeri dan swasta di Indonesia. Sebelum adanya program BOS, SMK Negeri 2 Metro hanya mengandalkan dana komite untuk pembiayaan operasional.

Bentuk dukungan kebijakan BOS dilatar belakangi dari keputusan pemerintah yang berupaya mengalihkan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke sektor pendidikan. Keputusan tersebut di kenal sebagai program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) dengan paket bantuan khusus murid dalam bentuk beasiswa kepada murid kurang mampu. Sedangkan dari sisi desentralisasi pendidikan secara umum, Pemerintah menetapkan prinsip pengelolaan berbasis sekolah dalam sistem pendidikan nasional dan menyediakan kerangka untuk standar

nasional Pendidikan (SNP) dengan PP Nomor 19 tahun 2005.

Sejak diberlakukan otonomi daerah tahun 2001, pengelolaan sekolah khususnya SMK di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah kementerian pendidikan nasional, kini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang nasional pendidikan. Adanya peraturan pemerintah tentang SNP diharapkan mampu menjawab persoalan yang menyangkut pengelolaan sekolah dasar sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. Seperti dijelaskan pada pasal 13 ayat 2 huruf b bahwa bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat antara lain ikut berperan serta dalam memberikan dukungan sumberdaya, dana, sarana prasarana, dan tenaga serta penyelenggaraan manajemen menjadi orangtua asuh. Selain itu, PP Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan semakin memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran serta dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.

Pembahasan

Melalui Permendiknas 044/U/2002. Sedangkan lampiran 5 merupakan peran yang diharapkan melalui komite sekolah sebagai sekolah rujukan SMK-SMK di Indonesia. Peran komite sekolah SMK Negeri 2 Metro yang sesungguhnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Peran Komite Sekolah sebagai Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Peran Komite sekolah SMK Negeri 2 Metro sebagai pertimbangan berperan memberikan masukan terhadap penyusunan dan pengesahan RKS/RKT/RKAS, mengikuti rapat

pleno pengesahan RKAS bersama orangtua murid dan dewan guru, termasuk memberikan pertimbangan tentang perubahan RKAS. Peran pertimbangan disampaikan dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan bantuan sarana prasarana sekolah melalui (*block grand*) dan DAK, Dana ADB. Invest dan dana rujukan yang dikenal dengan *swakelola*. Peran pertimbangan disampaikan oleh Komite Sekolah dalam rangka penerimaan siswa baru. Sedangkan dalam anggaran pendidikan Komite Sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk penggunaan dana dari iuran komite maupun dan dana bos berdasarkan RKAS yang telah disusun. Komite sekolah memberikan pertimbangan pada penyusunan perencanaan anggaran baik dari dana bos, dana komite maupun dana lain. Peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan memberikan arti bahwa, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah harus melalui pertimbangan Komite Sekolah. Peran komite sekolah sebagai *advisory agency* ini mencerminkan harapan sinergitas antara kepala sekolah dan komite SMK Negeri 2 Metro. Tanpa ada sinergitas akan berpengaruh terhadap *output* program yang dijalankan.

Menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, menyebutkan tentang peran Komite Sekolah adalah memberikan pertimbangan sekolah dalam rangka mengidentifikasi sumber daya sekolah, proses pembelajaran, ketenagaan, kebutuhan sarana prasarana sekolah, kebijakan sekolah, RAPBS, dan sebagainya. Uno (2008) menyebutkan beberapa kegiatan yang memerlukan partisipasi masyarakat (komite sekolah) dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan antara lain: (1) penyusunan

rencana kerja sekolah, (2) penyusunan rencana anggaran pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), (3) pelaksanaan program pendidikan, dan (4) transparansi dan akuntabilitas pendidikan.

Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (*supporting Agency*)

Peran sebagai pendukung baik segi financial, pemikiran maupun tenaga mutlak diperlukan untuk menghasilkan sebuah program yang bermutu disekolah. Kedua hal ini merupakan hal yang utama. Pemahaman bersama akan berdampak terhadap pengembangan mutu pendidikan yang berkualitas. Peran Komite Sekolah sebagai *supporting agency* tidak hanya berupa dukungan dana seperti iuran rutin, namun juga berupa sumbangan tenaga dan pikiran dalam rangka penyelenggaraan mutu pendidikan. Untuk menjalankan peran sebagai *supporting agency* komite SMK Negeri 2 Metro telah meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain berupa dukungan tenaga, sarana prasarana, maupun anggaran. Dalam menjalankan peran sebagai *supporting agency*, Komite SMK Negeri 2 Metro menunjukkan sudah memberikan dukungan berupa dana, karena dalam penyusunan RAPBS mengacu pada program kerja yang sudah dibuat, jika ada kekurangan maka komite melakukan penggalan dana bersama orang tua siswa. Peran komite sekolah sebagai pendukung memiliki alasan strategis, terutama berkaitan dengan penggalangan dana yang berpeluang besar dalam peningkatan mutu SMK Negeri 2 Metro. Sebagaimana diungkapkan ketua komite sekolah bahwa peran memberi dukungan dilakukan melalui keterlibatan penyusunan RKS/RKT/RKAS, mendukung sekolah dalam pelaksanaan ekstrakurikuler, mendukung sekolah

dalam merumuskan visi misi dan kegiatan serta tujuan sekolah. Dengan demikian dukungan yang diberikan komite SMK Negeri 2 Metro sudah selaras dengan upaya pemerintah bahwa dukungan tidak hanya berbentuk dana atau keuangan, melainkan juga dalam bentuk tenaga, ide, dan gagasan.

Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol (*Controlling Agency*)

Sebagai badan pengawasan, Komite SMK Negeri 2 Metro mempunyai peran yang dapat mengontrol kebijakan atau program kerja sekolah sehingga tidak menyimpang dari aturan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 bahwa komite sekolah dapat melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan pendidikan, melakukan pemantauan terhadap alokasi anggaran dalam pelaksanaan program-program sekolah, maupun melakukan pemantauan terhadap *output* sekolah seperti hasil ujian akhir, angka mengulang, angka partisipasi, dan angka bertahan. Peran *controlling agency* komite SMK Negeri 2 Metro sebagian sudah berjalan dengan baik, namun masih ada anggota komite sekolah yang belum mengetahui, memahami, dan melaksanakan peran tersebut. Peran sebagai *controlling agency* bertujuan meminimalisir terjadinya penyimpangan program dan kebijakan sekolah dalam meningkatkan kualitas. Pengawasan yang dilakukan komite SMK Negeri 2 Metro berupa pemantauan terhadap proses pembelajaran, hasil lulusan, kenaikan kelas serta penggunaan dana-dana sekolah maupun dana bantuan yang lain, serta memantau kondisi sarana prasarana, dan kondisi lingkungan SMK Negeri 2 Metro. Hal ini merupakan upaya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan kependidikan.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Uno (2008) bahwa transparansi dan akuntabilitas akan mendorong mutu sekolah.

Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung (*Mediator Agency*)

Selain sebagai badan pertimbangan, pendukung dan pengawas komite sekolah memiliki satu peran penting, yaitu sebagai penghubung atau *mediator agency*. Seperti dijelaskan dalam indikator kinerja komite sekolah, dalam menjalankan peran *mediator agency*, komite sekolah dapat melakukan kegiatan-kegiatan berikut: (1) menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah, (2) membantu sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan sekolah, (3) menyampaikan aspirasi masyarakat dalam usulan membuat kebijakan, dan sebagainya. Peran *mediator agency* komite SMK Negeri 2 Metro sebagai sekolah percontohan nasional memang belum berjalan secara maksimal, karena kerjasama dengan orangtua murid dan masyarakat sekitar masih minim dalam mendukung program-program sekolah. Peran komite sekolah SMK Negeri 2 Metro sebagai penghubung antara masyarakat dengan sekolah dalam menyampaikan informasi dari sekolah kepada masyarakat atau aspirasi masyarakat dan orangtua murid kepada sekolah. Peran yang dilakukan diantaranya ikut memobilisasi dan mengkoordinir bantuan masyarakat kepada sekolah apabila ada iuran untuk kegiatan rehabilitasi dan penambahan sarana prasarana sekolah. Sebagai *mediator agency* komite sekolah berperan menjembatani antara siswa dengan sekolah, orang tua dengan sekolah, masyarakat dengan sekolah, maupun sekolah dengan pemerintah. Namun demikian peran komite SMK Negeri 2 Metro sebagai mediator antara

pemerintah dan masyarakat belum maksimal.

Melihat tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap sekolah kejuruan era ini, komite sekolah perlu memahami dan melaksanakan peran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu caranya dengan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta untuk mengambil peran serta aktif dalam bidang pendidikan. Komite sekolah dan masyarakat dapat melaksanakan peran dengan cara melibatkan diri dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program sekolah. Dengan keterlibatan secara langsung, maka masyarakat yang telah diwadahi dalam komite sekolah akan merasa ikut memiliki dan mengelola lembaga pendidikan sehingga baik buruknya mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Pengelolaan pendidikan yang baik di sekolah akan mempengaruhi terjadinya peningkatan mutu proses pendidikan. Apabila mutu proses pembelajaran meningkat, maka peluang peningkatan kualitas hasil belajar siswa semakin besar.

Peran komite SMK Negeri 2 Metro dilihat dari teori Horton dan Hunt (1993) bahwa seorang mungkin tidak memandang suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain memandangnya. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. Peran komite SMK Negeri 2 Metro adalah cerminan perilaku yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya sebagaimana yang dituangkan dalam aturan pemerintah. Sementara itu komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Oleh karenanya, peran komite SMK Negeri 2 Metro sesuai dengan pendapat Horton dan Hunt (1993) bahwa perilaku seorang

dipengaruhi oleh faktor sumber daya, tingkat pendidikan dan komitmen serta loyalitas dalam menjalani peran. Dengan adanya pemahaman peran dari komite sekolah, maka diharapkan konflik antara sekolah dengan masyarakat (wali murid), komite sekolah dengan sekolah, dan sekolah dengan pemerintah dapat dihindarkan sehingga ada keharmonisan antara sekolah, Komite sekolah, masyarakat maupun pemerintah. Adanya keserasian hubungan tersebut, maka diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Sementara itu, menurut Berlo (1960) mengungkapkan bahwa sebuah sistem sosial akan melakukan peran yang sama dengan peran yang diharapkan dan peran ditentukan. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem tersebut. Sebagaimana yang terjadi dengan Komite Sekolah sebagai sistem sosial memiliki peran yang sudah ditentukan dalam Kepmendiknas 044/U/2002, dan ada peran yang diharapkan sebagaimana dalam indikator kinerja dan acuan operasional namun demikian dalam aktualisasi di sekolah peran komite sekolah yang dilaksanakan berbeda-beda.

Membandingkan peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan di negara maju (baca: Amerika Serikat) pengembangan sekolah di pedesaan atau di daerah-daerah urban berada di tangan dewan masyarakat sekolah (SCC=*School Community Council*). Dewan ini terdiri dari unsur-unsur tenaga profesional pendidikan dan anggota masyarakat, dalam rangka pengembangan staf.

Kebijakan model pelibatan masyarakat dalam pendidikan melalui lembaga SCC seperti Amerika ini sebenarnya sudah dikenal dan dilakukan oleh pendidikan dan persekolahan di Indonesia, mulai dari POM, POMG,

BP3, hingga sekarang yang dikenal dengan Komite Sekolah. Secara resmi sejak tahun 2002 Pemerintah Indonesia melalui Kemendiknas membuat kebijakan baru dengan mengganti istilah BP3 menjadi Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat sekolah. Komite SMK Negeri 2 Metro memang sudah mengupayakan perannya dalam peningkatan mutu sekolah, namun hanya beberapa pengurus yang memiliki komitmen dalam melaksanakan perannya secara tugas dan fungsinya. Alasan klasik Komite Sekolah tidak mendapatkan bayaran (baca:gaji) bagi sebagian anggota merasa beban kerja dan tanggung jawab belum sebanding. Di samping itu, kecenderungan pengurus komite SMK Negeri 2 Metro belum memahami tugas dan fungsinya secara benar, sehingga peran yang diberikan untuk peningkatan mutu sekolah tidak maksimal.

Sementara itu Bank Dunia mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut :

“the process of increasing the capacity of individuals or groups to make choices and to transform those choices into desired actions and outcomes”.

Dengan kata lain, pemberdayaan dapat di maknai sebagai proses peningkatan kapasitas individual atau kelompok untuk membuat pilihan dan untuk melaksanakan pilihan tersebut kedalam kegiatan-kegiatan dan hasil yang diharapkan. Dalam konteks kelembagaan komite sekolah, peningkatan kapasitas yang dimaksud adalah para anggota komite sekolah agar dapat melaksanakan peran secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah. Secara yuridis formal, SMK Negeri 2 Metro telah memiliki perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program sekolah. Kehadiran komite sekolah telah menunjukkan peran sebagai mitra

sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program, baik program pembangunan fisik maupun non fisik, seperti peningkatan proses pembelajaran.

Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan peran komite sekolah belum melaksanakan peran sebagai mitra sekolah sesuai yang diharapkan pemerintah. Kondisi yang terjadi di SMK Negeri 2 Metro bahwa sosialisasi tentang tentang peran komite sekolah kepada masyarakat belum efektif dilaksanakan sehingga peran belum dilaksanakan secara optimal.

Berbagai dukungan kebijakan pemerintah diatas bagi SMK Negeri 2 Metro ternyata belum cukup dalam penyelenggaraan sekolah rujukan secara nasional. Pada saat ini dana BOS yang diklaim mencukupi biaya operasional justru berakibat mematikan peran serta masyarakat dan orang tua murid dalam pendanaan sekolah. Melihat kondisi di atas, komite sekolah akan berniat demikian belum diimbangi dengan kemampuan APBD kota guna menyediakan dana pendampingan BOS untuk menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Selain itu, APBD provinsi sebagai alternatif sumber pendanaan juga belum mampu memberikan berupa dana bagi sekolah standar rujukan secara rutin.

Sementara itu peran Komite Sekolah dalam menggalang dukungan dana akhir-akhir ini dipermasalahkan, karena sekolah jenjang SMA/SMK sudah mendapatkan dana BOS. Apabila tidak ada dana bantuan dari komite maka jumlah dana untuk operasional minim. Akibatnya semua program kerja dan operasional sekolah hanya tergantung dari jumlah dana yang diterima. Akibatnya pelaksanaan manajemen dan proses pembelajaran sekolah rujukan dengan sekolah reguler bisa dibilang sama karena hanya mengandalkan dana yang diterima. Di satu sisi input dan dukungan dana dari

pemerintah pusat dan daerah adalah untuk sarana dan prasarana.

Keterbatasan pendanaan sekolah secara tegas di atur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 mengenai pendanaan sekolah. Sementara strategi pengembangan sekolah rujukan, tidak cuma terbatas pada pembangunan fisik semata, namun pengembangka inovasi pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) dan ini membutuhkan dana operasional. Oleh karena itu Sekolah rujukan harus mampu melakukan inovasi, khususnya dalam pembelajaran.

Untuk itu, solusi yang perlu dilakukan oleh SMK Negeri 2 Metro sebagai sekolah rujukan adalah penggalangan partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: iuran dan sumbangan finansial orangtua/wali, ide/pemikiran, tenaga, sampai dengan sumbangan material untuk mengembangkan sekolah sesuai dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang telah ditetapkan bersama. Penggalangan potensi masyarakat diperlukan mengingat kemampuan pemerintah guna mendukung program pendidikan sangat terbatas, sementara pendidikan bermutu memerlukan berbagai dukungan fasilitas yang memadai.

Lebih dari sekedar berpartisipasi dalam hal pendanaan, masyarakat dan orangtua murid harus dapat mencermati dan mengkritisi pengelolaan dana sekolah dengan cara melihat dan mengakses dokumen perencanaan dan laporan keuangan sekolah. Hal ini dimungkinkan sebagaimana diputuskan oleh komisi informasi pusat perihal dokumen SPJ dana BOS adalah dokumen terbuka sepanjang telah di periksa oleh lembaga pemeriksa dan disampaikan kepada lembaga perwakilan. Masyarakat dapat memanfaatkan peluang ini guna memperoleh informasi pengelolaan

dana sekolah untuk selanjutnya memberikan penilaian terhadap kinerja sekolah apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sekolah yang transparan dalam pengelolaan dana sekolah dengan mudah akan mendapatkan simpati dan perhatian dari orangtua murid dan masyarakat. Dengan demikian sebagian kekurangan dan kebutuhan sekolah, terutama pendanaan pendidikan akan mudah diatasi karena warga sekolah dengan ikhlas akan membantu mencari dana ke pemerintah, swasta atau secara swadaya. Harapan orangtua dan masyarakat adalah SMK Negeri 2 Metro sebagai sekolah rujukan yang berprestasi, jujur, (transparan), dan mampu mengantarkan para lulusannya ke dunia kerja.

Keberhasilan perilaku ke-disiplinan dan kebersihan lingkungan siswa tidak dapat dipisahkan dari peran komite sekolah. Pelaksanaan manajemen pendidikan di SMK Negeri 2 Metro dalam menetapkan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan merupakan bentuk pengayaan materi internaslisasi budaya peduli lingkungan dan kedisiplinan siswa. Gambaran ini menunjukkan format muatan lokal di sekolah yang senantiasa memperhatikan penilaian, masukan dan harapan masyarakat melalui komite sekolah. Konsep ini sejalan dengan Arcaro (2005) yang mengatakan bahwa mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Dalam konteks ini keluaran bukan hanya sekedar berapa nilai yang di peroleh tetapi keluaran siswa sebagai individu. Lebih jelas lagi dikatakan output kualitas tinggi apabila prestasi siswa menunjukkan capaian yang tinggi pula. Prestasi yang dimaksud berupa akademik dan non akademik. Prestasi non akademik seperti IMTAQ, kejujuran, kesopanan, kedisiplinan, ketrampilan, dan kegiatan ekstrakurikuler lain.

Dengan “keterbatasan-keterbatasan” yang ada pada SMK Negeri 2 Metro, maka peran orangtua/wali murid dengan segala potensinya dapat memberikan “sumbangan” (bukan hanya finansial) untuk mengisi serta memberikan warna dalam muatan lokal sekolah agar proses pembelajaran dikelas menjadi relatif lebih bervariasi, efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Untuk menunjang hal ini dukungan potensi stakeholders baik pemerintah, sekolah, siswa, serta orangtua/wali murid atau masyarakat sangat dibutuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Metro dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan sudah berjalan efektif di SMK Negeri 2 Metro, diantara pertimbangan tersebut adalah : (1) penyusunan dan pengesahan RKS/RKT/RKAS, (2) rapat pleno pengesahan RKAS bersama orangtua murid dan dewan guru, (3) pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan bantuan sarana prasarana sekolah melalui (*block grand*) dan DAK, Dana ADB. Invest, dana rujukan yang dikenal dengan swakelola dan dana bantuan dari orang tua siswa, (4) Peran pertimbangan disampaikan oleh komite sekolah dalam penerimaan peserta didik baru.
2. Peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan sudah dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain berupa dukungan tenaga pendidik

dan kependidikan, sarana prasarana, maupun anggaran. Dalam menjalankan peran sebagai *supporting agency*, komite SMK Negeri 2 Metro menunjukkan dukungannya dalam penyusunan RAPBS mengacu pada program kerja yang sudah dibuat oleh sekolah, jika ada kekurangan pendanaan maka komite melakukan penggalan dana bersama orang tua siswa. Dukungan juga diberikan kepada sekolah dalam pelaksanaan ekstrakurikuler, perumusan visi misi dan kegiatan serta tujuan sekolah.

3. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol dilaksanakan dengan memantau terhadap pelaksanaan program-program sekolah, pemantauan terhadap proses pembelajaran, hasil lulusan, kenaikan kelas serta penggunaan dana-dana sekolah maupun dana bantuan yang lain, serta memantau kondisi sarana prasarana, dan kondisi lingkungan SMK Negeri 2 Metro dalam peningkatan mutu pendidikan.
4. Peran sebagai penghubung telah dilaksanakan oleh komite SMK Negeri 2 Metro sebagai berikut: (1) menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah, (2) membantu sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan sekolah kepada orang tua siswa, (3) menyampaikan aspirasi masyarakat dalam usulan membuat kebijakan, dan sebagainya.

Saran

Agar peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan lebih optimal, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait (*stakeholder*), berdasarkan kesimpulan

dari pembahasan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah rujukan agar memenuhi aspek dan karakteristik pendidikan sebagai sekolah yang diunggulkan ditingkat nasional.

Pemerintah perlu melakukan perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk mengetahui kebutuhan riil sekolah sehingga kontribusi orang tua dan masyarakat tidak terus-terusan menjadi polemik yang mengganggu pelaksanaan pendidikan.

Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi pengawas SMK guna melaksanakan sosialisasi dan penguatan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah, dalam memberikan dukungan program kerja sebagai sekolah rujukan nasional.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam rangka efisiensi dan efektifitas anggaran pendidikan.

2. Kepala Sekolah

Sekolah perlu mengefektifkan pokja-pokja di SMK Negeri 2 Metro dalam rangka membantu peran Komite sekolah terhadap peningkatan mutu pengelolaan manajemen sekolah, proses pembelajaran dan hasil belajar yang belum dilakukan oleh komite sekolah.

Sekolah perlu melakukan monitoring dan evaluasi peran komite bersama orang tua dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pendidikan sebagai sekolah rujukan memenuhi standar yang di syaratkan.

Sekolah perlu melakukan re-organisasi Komite Sekolah sesuai dengan proses yang diatur dalam Kepmendiknas 044/U/2002 supaya kualitas pendidikan di SMK Negeri 2 Metro sebagai sekolah rujukan dapat dipercaya dan mendapat dukungan masyarakat luas.

Sekolah perlu melakukan penyampaian laporan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel supaya kepercayaan orang tua dapat tumbuh dan partisipasi masyarakat, swasta dan alumni lebih meningkat dalam hal pendanaan sekolah.

3. Komite Sekolah

Sebaiknya peran komite sekolah dan MBS perlu disosialisasikan secara komprehensif kepada guru dan kepala sekolah, dengan tujuan untuk menghindari persepsi yang berbeda dari komite sekolah.

Peran mediasi agar dapat dioptimalkan, terutama dalam kerjasama dengan dunia usaha dan industri, maupun pemerintah.

Peran kepengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan perlu didukung dengan rencana kerja komite.

Kegiatan pertemuan komite sekolah perlu dilaksanakan lebih efektif, agar pemantauan terhadap segala kegiatan dan peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat didukung semua unsur.

4. Peneliti Selanjutnya.

Untuk peneliti selanjutnya agar meneliti faktor-faktor lain yang dapat mengungkap aspek-aspek yang belum tersentuh atau masih perlu dikaji ulang secara mendalam sehingga peran dan fungsi komite sekolah dapat maksimal dilaksanakan dalam peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro S. Jerome. 2005. Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berlo, David K. 1960 *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice*, Holt, Rinehart and Winstan, Inc. United State of Amirica.
- Creswell, John W. 1998. *Research Desaign: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Jakarta
- Usman, Husaini. 2009. Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan, CV. Bumi Aksara, Jakarta
- Komariah Aan, dan Cipi Triatna. 2004. *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Maya H. 2012. *Kesalahan-kesalahan Umum Kepala Sekolah dalam Mengelola Pendidikan*, Bukubiru, Jogjakarta.
- Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1993. Sosiologi. Jakarta, Erlangga.
- Sagala, 2011. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, CV. Alfabeta, Jakarta.
- Stake, Robert E, 1995. *The Art of Case Study*, London: Sage Publication, Inc.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, CV. Alfabeta, Bandung
- Uno, Hamzah. 2008. *Model Pembelajaran, Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang kreatif dan efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yin, Robert K, 2003. *Studi Kasus : Desain dan Metode*, Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.